



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 74 TAHUN 2017
TENTANG
PETA JALAN SISTEM PERDAGANGAN NASIONAL BERBASIS
ELEKTRONIK (*ROAD MAP E-COMMERCE*) TAHUN 2017-2019

PETA JALAN SISTEM PERDAGANGAN NASIONAL BERBASIS ELEKTRONIK (*ROAD MAP E-COMMERCE*) TAHUN 2017-2019

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
A.	Pendanaan					
1.	Pendanaan dan skema pembiayaan-pinjaman	a. Meningkatkan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan penilaian risiko kredit yang disesuaikan dengan model bisnis perdagangan berbasis elektronik (<i>e-Commerce</i>)	Tata cara dan pedoman penyaluran KUR yang melingkupi penilaian kredit, dokumen persyaratan, penilaian kelayakan usaha yang akan dijamin oleh perusahaan penjaminan, dan ketentuan pinjaman yang disesuaikan dengan model bisnis perdagangan berbasis elektronik (<i>e-Commerce</i>)	Oktober 2017	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian	1. Kementerian Keuangan 2. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 3. Otoritas Jasa Keuangan 4. Bank Indonesia

b. Mengoptimalkan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
		b. Mengoptimalkan Bank/Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) sebagai penyalur KUR	a. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang mengatur mengenai <i>tenant</i> pengembang <i>Platform e-Commerce</i> menjadi penerima dana KUR yang disalurkan oleh Bank/IKNB b. Peningkatan intensitas Program Laku Pandai dan <i>e-money</i> untuk mendukung inklusi <i>financial</i>	November 2017	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian	1. Otoritas Jasa Keuangan 2. Bank Indonesia 3. Kementerian Komunikasi dan Informatika 4. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 5. Badan Ekonomi Kreatif
2.	Pendanaan dan skema pembiayaan-hibah (<i>grants</i>)/subsidi	a. Menyusun skema penyediaan hibah untuk penyelenggaraan inkubator bisnis	Skema pemberian hibah untuk mengembangkan dan meningkatkan kapasitas inkubator bisnis agar mampu memberikan pendampingan yang optimal kepada pelaku usaha pemula (<i>start-up</i>) yang inovatif termasuk di sektor perdagangan berbasis elektronik (<i>e-Commerce</i>)	November 2017	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian	1. Kementerian Komunikasi dan Informatika 2. Badan Ekonomi Kreatif 3. Kementerian Perdagangan 4. Kementerian Keuangan

5. Kementerian...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
						5. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 6. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 7. Asosiasi <i>E-Commerce</i> dan <i>Digital Economy</i>
		b. Menyusun skema penyediaan hibah yang sumbernya berasal dari dana tanggung jawab sosial perusahaan dari BUMN dan yang sejenis	Skema penyediaan hibah melalui relokasi beberapa dana tanggung jawab sosial perusahaan (BUMN dan perusahaan-perusahaan besar) yang mendukung berbagai tahap siklus hidup bisnis perdagangan berbasis elektronik (<i>e-Commerce</i>)	November 2017	Menteri Badan Usaha Milik Negara	1. Kementerian Keuangan 2. Kementerian Perdagangan 3. Kementerian Komunikasi dan Informatika 4. Kementerian Perindustrian

3. Penyediaan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
3.	Penyediaan alternatif pendanaan dan skema pembiayaan – hibah (<i>grants</i>)/subsidi	Menyelaraskan skema hibah dan subsidi untuk mendukung ekosistem ekonomi digital	<p>a. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika yang mendukung pemanfaatan dana <i>Universal Service Obligation</i> (USO) yang tidak hanya terbatas untuk sektor telekomunikasi saja, namun dapat juga dimanfaatkan untuk ekosistem ekonomi digital, terutama di Daerah Tertinggal, Terpencil, dan Terluar (3T) sesuai kebutuhan</p> <p>b. Badan Layanan Umum yang dapat menyalurkan hibah pemerintah/<i>Universal Service Obligation</i> (USO)/subsidi pemerintah kepada digital UMKM dan</p>	Oktober 2017	Menteri Komunikasi dan Informatika	<p>1. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah</p> <p>2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional</p> <p>3. Kementerian Keuangan</p>

start-up...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
			<i>start-up E-Commerce Platform</i> , terutama di Daerah 3T sesuai kebutuhan			
4.	Penyediaan alternatif pendanaan dan skema pembiayaan <i>angel capital/seed capital</i>	a. Mewujudkan <i>business matching</i> antara <i>angel investor</i> dan perusahaan modal ventura dengan perusahaan perdagangan berbasis elektronik (<i>e-Commerce</i>) yang potensial	Skema penyertaan modal melalui <i>angel capital</i> /modal ventura	November 2017	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian	<ol style="list-style-type: none">1. Kementerian Komunikasi dan Informatika2. Badan Ekonomi Kreatif3. Kementerian Perdagangan4. Otoritas Jasa Keuangan5. Asosiasi Modal Ventura/<i>Angel Capital</i>6. Asosiasi <i>E-Commerce</i> dan <i>Digital Economy</i>

b. Menyusun...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
		b. Menyusun skema dengan menggunakan pendekatan “Bapak Angkat” yang dapat digunakan oleh pelaku usaha atau industri yang tidak termasuk industri Teknologi dan Informasi (Non-TIK) Besar dengan menyediakan <i>seed capital</i> dan dukungan teknologi untuk mendukung para pelaku usaha pemula (<i>start-up</i>)	Skema penyediaan <i>seed capital</i> dari “Bapak Angkat” pelaku usaha TIK	November 2017	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian	<ol style="list-style-type: none">1. Kementerian Komunikasi dan Informatika2. Badan Ekonomi Kreatif3. Kementerian Perdagangan4. Otoritas Jasa Keuangan5. Asosiasi Modal Ventura/ <i>Angel Capital</i>6. Asosiasi <i>E-Commerce</i> dan <i>Digital Economy</i>

5. Ketersediaan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
5.	Ketersediaan alternatif pendanaan dan skema pembiayaan – urun dana (<i>crowd funding</i>)	Mengembangkan skema urun dana sebagai alternatif pendanaan termasuk kerangka manajemen risiko untuk mengatur skema urun dana dengan tepat	Skema pelaksanaan pembiayaan urun dana dengan mengadopsi skema pelopor urun dana yang sukses, memberikan perlindungan kepada para investor, dan mengurangi risiko perusahaan urun dana, termasuk melalui dukungan dana dari perusahaan-perusahaan besar	November 2017	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian	1. Kementerian Keuangan 2. Otoritas Jasa Keuangan 3. Kementerian Perindustrian 4. Kementerian Komunikasi dan Informatika 5. Kementerian BUMN 6. Kementerian Perdagangan 7. Bank Indonesia 8. Badan Ekonomi Kreatif 9. Asosiasi <i>E-Commerce</i> dan <i>Digital Economy</i>

6. Pembukaan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
6.	Pembukaan berjenjang Daftar Negatif Investasi (DNI)	Menyusun DNI terkait perdagangan berbasis elektronik (<i>e-Commerce</i>) dalam bentuk pembukaan berjenjang dengan persyaratan	<p>2 (dua) Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Baru <i>Platform</i> perdagangan berbasis elektronik (<i>e-Commerce</i>) yang merepresentasikan bisnis <i>E-Commerce, Marketplace, Digital Ads, On Demand service</i> dll.</p> <p>a. Penyedia <i>Platform</i> berbasis elektronik (termasuk aplikasi dan OTT), dengan nilai investasi sampai dengan Rp. 100 Miliar (maksimum kepemilikan asing 49%)</p> <p>b. Penyedia <i>Platform</i> berbasis elektronik (termasuk aplikasi dan OTT), dengan nilai investasi</p>	Oktober 2017	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian	<ol style="list-style-type: none">1. Kementerian Komunikasi dan Informatika2. Kementerian Perdagangan3. Badan Koordinasi Penanaman Modal4. Badan Pusat Statistik

di atas...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
			di atas Rp. 100 Miliar (kepemilikan asing sampai dengan 100%)			
B. Perpajakan						
7.	Penyederhanaan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan	a. Menyederhanakan tata cara perpajakan bagi pelaku usaha perdagangan berbasis elektronik (<i>e-Commerce</i>) yang omzetnya di bawah Rp. 4,8 Miliar per tahun	Penerapan aturan perpajakan bagi pelaku usaha dengan jumlah peredaran usaha sampai dengan Rp. 4,8 Miliar per tahun, berlaku bagi pelaku usaha perdagangan berbasis elektronik (<i>e-Commerce</i>) yang omzetnya di bawah Rp. 4,8 Miliar per tahun	Desember 2017	Menteri Keuangan	1. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 2. Kementerian Perdagangan 3. Badan Ekonomi Kreatif
		b. Menyusun insentif pajak bagi investor perdagangan	1) Skema pemberian insentif bagi perusahaan modal ventura yang menanamkan	November 2017	Menteri Keuangan	1. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

berbasis...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
		berbasis elektronik (<i>e-Commerce</i>)	modal kepada perusahaan pasangan usaha yang memenuhi kriteria tertentu, termasuk perusahaan <i>e-Commerce</i>			2. Kementerian Perdagangan 3. Badan Ekonomi Kreatif
			2) Dokumen analisa pemberian insentif pajak bagi <i>angel</i> investor dan sumber pendanaan lainnya yang mendanai usaha pemula (<i>start-up</i>) pada tahap awal	Desember 2017	Menteri Keuangan	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2. Kementerian Komunikasi dan Informatika 3. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 4. Badan Ekonomi Kreatif 5. Asosiasi <i>E-Commerce</i> dan <i>Digital Economy</i>

8. Penyusunan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
8.	Penyusunan Tata Cara Pendaftaran bagi pelaku usaha <i>e-Commerce</i>	Menyusun regulasi kewajiban pelaku usaha <i>e-Commerce</i> untuk mendaftarkan diri termasuk pelaku usaha asing	Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan dan Tata Cara Pendaftaran dan Penerbitan Nomor Identitas Pelaku Usaha Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (TPMSE)	September 2017	Menteri Perdagangan	1. Kementerian Keuangan 2. Kementerian Komunikasi dan Informatika 3. Asosiasi <i>E-Commerce</i> dan <i>Digital Economy</i>
9.	Persamaan Perlakuan Perpajakan	Menyusun regulasi yang mendukung pengenaan pajak atas pelaku usaha <i>e-commerce</i> asing dan lokal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan	Peraturan menteri/kepala lembaga sektor terkait	Februari 2018	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian	1. Kementerian Keuangan 2. Kementerian Perdagangan 3. Kementerian Komunikasi dan Informatika

C. Perlindungan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
C.	Perlindungan Konsumen					
10.	Penyusunan Regulasi Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik	Menyelesaikan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik	Peraturan Pemerintah tentang Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik	Oktober 2017	Menteri Perdagangan	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 3. Kementerian Sekretariat Negara
11.	Membangun Kepercayaan Konsumen	Melakukan harmonisasi regulasi yang berlaku secara selaras dan konsisten	Kerangka hukum komprehensif yang akan mengakomodir: a. klasifikasi pelaku usaha perdagangan berbasis elektronik (<i>e-Commerce</i>) b. sertifikasi elektronik c. proses akreditasi d. kebijakan mekanisme pembayaran	November 2017	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian	1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 2. Kementerian Komunikasi dan Informatika

e. perlindungan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
			<ul style="list-style-type: none">e. perlindungan konsumen dan pelaku industri khusus untuk transaksi perdagangan berbasis elektronik (<i>e-Commerce</i>)f. skema penyelesaian sengketa berbasis online (<i>online dispute resolution</i>)g. internalisasi perlindungan konsumen khusus perdagangan berbasis elektronik (<i>e-Commerce</i>) dalam strategi nasional perlindungan konsumenh. sistem aplikasi informasi pelaku usaha perdagangan berbasis elektronik (<i>e-Commerce</i>)			<ul style="list-style-type: none">3. Kementerian Perdagangan4. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia5. Badan Pusat Statistik6. Bank Indonesia7. Otoritas Jasa Keuangan8. Asosiasi <i>E-Commerce</i> dan <i>Digital Economy</i>

12. Pengembangan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
12.	Pengembangan Gerbang Pembayaran Nasional (<i>National Payment Gateway</i>)	Mengembangkan <i>National Payment Gateway</i> secara bertahap yang dapat meningkatkan layanan pembayaran ritel elektronik termasuk transaksi perdagangan berbasis elektronik (<i>e-Commerce</i>)	a. Sistem pembayaran yang mengakomodasi perdagangan dan pembelanjaan barang/jasa pemerintah melalui perdagangan berbasis elektronik (<i>e-Commerce</i>)	Oktober 2017	Menteri Keuangan	1. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2. Bank Indonesia
			b. Ketentuan Pengaturan Sarana Pemroses Transaksi Pembayaran	Oktober 2017	Gubernur Bank Indonesia	1. Otoritas Jasa Keuangan 2. Kementerian Keuangan 3. Kementerian Komunikasi dan Informatika
			c. <i>Conceptual design</i> pengembangan <i>National Payment Gateway</i> termasuk untuk mendukung layanan perdagangan berbasis elektronik (<i>e-Commerce</i>)	November 2017	Gubernur Bank Indonesia	1. Otoritas Jasa Keuangan 2. Kementerian Keuangan 3. Kementerian Komunikasi dan Informatika

d. Peningkatan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
			d. Peningkatan efisiensi dan proteksi pemanfaatan sistem pembayaran yang telah ada			4. Asosiasi <i>E-Commerce</i> dan <i>Digital Economy</i> 5. Perusahaan " <i>Payment Gateway</i> "
			e. Pokok-pokok pengaturan <i>National Payment Gateway</i> f. Implementasi <i>National Payment Gateway</i>	April 2019	Gubernur Bank Indonesia	Kementerian Komunikasi dan Informatika
D.	Pendidikan dan Sumber Daya Manusia					
13.	Peningkatan kesadaran dan pendidikan bagi konsumen, UKM, dan keseluruhan ekosistem perdagangan berbasis elektronik (e-Commerce)	Memberikan edukasi bagi seluruh ekosistem perdagangan berbasis elektronik (e-Commerce)	a. Program pendidikan berkelanjutan untuk mendidik masyarakat tentang penggunaan perdagangan berbasis elektronik (e-Commerce) dan pengembangan industri b. Mekanisme dan identifikasi pihak yang akan bertanggungjawab untuk	2017 - 2019	Menteri Komunikasi dan Informatika	1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 3. Kementerian Perdagangan

melaksanakan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
			<p>melaksanakan program dan mengembangkan isi dari program tersebut</p> <p>c. Sosialisasi perdagangan berbasis elektronik (<i>e-Commerce</i>) untuk mengkomunikasikan kepada publik mengenai jenis-jenis produk ilegal dalam wilayah yurisdiksi Indonesia</p> <p>d. Kampanye kesadaran nasional perdagangan berbasis elektronik (<i>e-Commerce</i>) melalui media <i>online</i> dan <i>offline</i> di seluruh Indonesia</p> <p>e. Promosi perdagangan berbasis elektronik (<i>e-Commerce</i>) melalui kampanye informal (antara lain melalui: Hari Belanja <i>Online</i> Nasional/Harbolnas)</p>			<p>4. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah</p> <p>5. Asosiasi <i>E-Commerce</i> dan <i>Digital Economy</i></p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
14.	Pembekalan kepada pembuat kebijakan dengan pemahaman atas perdagangan berbasis elektronik (<i>e-Commerce</i>) sesuai dengan peran masing-masing <i>stakeholders</i>	Melaksanakan edukasi perdagangan berbasis elektronik (<i>e-Commerce</i>) bagi para pembuat kebijakan agar para <i>stakeholders</i> mendapatkan pemahaman tentang perdagangan berbasis elektronik (<i>e-Commerce</i>) sesuai peran masing-masing.	Materi perdagangan berbasis elektronik (<i>e-Commerce</i>) yang terintegrasi ke dalam materi peningkatan kapasitas untuk para pembuat kebijakan	September 2017	Menteri Perdagangan	1. Kementerian Komunikasi dan Informatika 2. Lembaga Administrasi Negara
15.	Penyusunan program inkubasi untuk pelaku usaha pemula (<i>start-up</i>)	Menyusun program inkubasi bagi <i>start-up</i> untuk membantu perkembangan pelaku usaha pemula (<i>start-up</i>) terutama pada tahap awal	Pelaku usaha (swasta atau BUMN) yang mendukung dan mengelola "Program Inkubator Nasional" yang akan membantu pengembangan-pelaku usaha pemula (<i>start-up</i>) dengan memberikan pelatihan manajemen dan ruang kerja	Oktober 2017	Kepala Badan Ekonomi Kreatif	1. Kementerian Komunikasi dan Informatika 2. Kementerian Badan Usaha Milik Negara 3. Kementerian Perindustrian 4. Kementerian Perdagangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
						5. Kamar Dagang dan Industri Indonesia 6. Asosiasi <i>E-Commerce</i> dan <i>Digital Economy</i>
16.	Pendidikan formal untuk kebutuhan talenta perdagangan berbasis elektronik (<i>e-Commerce</i>)	Mempersiapkan kebutuhan talenta dalam rangka mempertahankan keberlangsungan ekosistem perdagangan berbasis elektronik (<i>e-Commerce</i>) melalui pendidikan formal	a. Implementasi kurikulum yang mencakup subyek terkait perdagangan berbasis elektronik (<i>e-Commerce</i>) di berbagai tingkatan satuan pendidikan b. Skema insentif bagi organisasi atau satuan pendidikan yang terfokus pada pelatihan atau pendidikan terkait perdagangan berbasis elektronik (<i>e-Commerce</i>) dalam rangka peningkatan jumlah lulusan Teknologi Informasi untuk mendorong	November 2017	1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 2. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	Kementerian Komunikasi dan Informatika

pertumbuhan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
			pertumbuhan industri secara signifikan			
17.	Pengembangan fasilitator edukasi perdagangan berbasis elektronik (<i>e-Commerce</i>)	Mengembangkan fasilitator edukasi perdagangan berbasis elektronik (<i>e-Commerce</i>)	a. Fasilitator edukasi perdagangan berbasis elektronik b. Edukasi komprehensif untuk ekosistem perdagangan berbasis elektronik (<i>e-Commerce</i>) oleh fasilitator	September 2017	Menteri Perdagangan	1. Kementerian Komunikasi dan Informatika 2. Asosiasi <i>E-Commerce</i> dan <i>Digital Economy</i>
E.	Infrastruktur Komunikasi					
18.	Peningkatan infrastruktur komunikasi (kecepatan internet, jaringan, dan keamanan)	Meningkatkan infrastruktur komunikasi nasional sebagai tulang punggung pertumbuhan industri	a. Dokumen analisa teknis dan studi pasar infrastruktur sistem perdagangan berbasis elektronik (<i>e-Commerce</i>) dan hasil evaluasi dampak	Oktober 2017	Menteri Komunikasi dan Informatika	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

sistem...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
		sistem perdagangan berbasis elektronik (<i>e-Commerce</i>)	b. Domain gratis dan kecepatan akses internet yang mendukung pertumbuhan industri sistem perdagangan berbasis elektronik (<i>e-Commerce</i>) c. Infrastruktur pita lebar / <i>broadband</i> dalam rangka peningkatan kecepatan internet seluruh wilayah Indonesia	Juli 2019	Menteri Komunikasi dan Informatika	1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
F.	Logistik					
19.	Peningkatan logistik perdagangan berbasis elektronik (<i>e-Commerce</i>) melalui cetak biru	Memanfaatkan cetak biru Sislognas untuk meningkatkan kecepatan pengiriman logistik perdagangan berbasis elektronik (<i>e-Commerce</i>) dan	a. Pelaksanaan cetak biru Sislognas, termasuk elemen khusus yang akan memberikan manfaat untuk sektor perdagangan berbasis elektronik (<i>e-Commerce</i>)	November 2017	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian	1. Kementerian Perhubungan 2. Kementerian Keuangan

Sistem...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
	Sistem Logistik Nasional (Sislognas)	mengurangi biaya pengiriman	b. Standardisasi Sistem Pertukaran Data Elektronik untuk pelaku usaha perdagangan berbasis elektronik (<i>e-Commerce</i>) dan logistik			3. Asosiasi Perusahaan Nasional Pengiriman dan Pengantaran Barang Indonesia
20.	Pelaksanaan alih daya fasilitas logistik <i>E-Commerce</i> untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Pengembangan alih daya fasilitas logistik perdagangan berbasis elektronik (<i>e-Commerce</i>) khususnya untuk mendukung pengembangan perdagangan berbasis elektronik (<i>e-Commerce</i>) untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	a. Mekanisme alih daya logistik bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; atau b. Fasilitas logistik <i>e-Commerce</i> yang dikembangkan oleh penyedia jasa logistik	Oktober 2017	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian	1. Kementerian Perhubungan 2. Asosiasi Perusahaan Nasional Pengiriman dan Pengantaran Barang Indonesia

21. Peningkatan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
21.	Peningkatan Kapasitas Penyedia Jasa Logistik Lokal/Nasional untuk memenuhi kebutuhan pengiriman di seluruh Indonesia	a. Memperkuat penyedia jasa logistik lokal/nasional yang kompetitif	a. Peningkatan kapasitas penyedia jasa logistik lokal/nasional yang kompetitif dalam sistem perdagangan nasional berbasis elektronik melalui pembinaan dan pemberian akses permodalan (KUR untuk UMKM)	Oktober 2017	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian	1. Kementerian Komunikasi dan Informatika 2. Kementerian Keuangan 3. Kementerian Perdagangan 4. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 5. Kementerian Perhubungan 6. Asosiasi Perusahaan Nasional Pengiriman dan Pengantaran Barang Indonesia

b. Revitalisasi,...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
		b. Revitalisasi, restrukturisasi dan modernisasi PT Pos Indonesia (Persero) sebagai penyedia jasa pos nasional	PT Pos Indonesia (Persero) yang modern dan berdaya saing	November 2017	Menteri Badan Usaha Milik Negara	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2. Kementerian Komunikasi dan Informatika 3. PT Pos Indonesia (Persero)
22.	Pengembangan Sistem Logistik dari Desa ke Kota	Mengembangkan Sistem Logistik dari Desa ke Kota	a. Aplikasi perdagangan berbasis elektronik (<i>e-Commerce</i>) yang dapat menghubungkan petani/nelayan/pelaku usaha di desa dengan para pedagang pengumpul dan/atau konsumen b. Edukasi para pelaku usaha dan pedagang lokal terhadap sistem perdagangan berbasis elektronik (<i>e-Commerce</i>)	April 2019	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian	1. Kementerian Perdagangan 2. Kementerian Komunikasi dan Informatika 3. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 4. Kementerian Perhubungan

c. Pusat...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
			<ul style="list-style-type: none">c. Pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi berbasis sistem informasid. Akses permodalan (KUR)e. Jasa logistik lokal/cabang jasa logistik nasionalf. Jaringan keuangan (Bank/IKNB)g. Infrastruktur ICT perdesaanh. Infrastruktur transportasi perdesaani. Proyek Percontohan (<i>Pilot Project</i>) di beberapa kota untuk Program Logistik Desa ke Kota (Sentra Bawang, Cabe dan Sayuran)			<ul style="list-style-type: none">5. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat6. Kementerian Pertanian7. Kementerian Perindustrian8. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi9. Bank Indonesia10. Otoritas Jasa Keuangan

G. Keamanan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
G. Keamanan Siber (<i>Cyber Security</i>)						
23.	Peningkatan keamanan atas aktivitas transaksi elektronik	Meningkatkan penerapan prinsip-prinsip <i>cyber security</i> oleh pedagang <i>online</i> dan/atau operator	Prosedur operasi dan regulasi standar umum yang terkait dengan penyimpanan data konsumen, sertifikasi untuk keselamatan data konsumen, serta perumusan regulasi untuk <i>Cybercrime</i>	Oktober 2017	Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	1. Kementerian Komunikasi dan Informatika 2. Kementerian Keuangan 3. Bank Indonesia 4. Otoritas Jasa Keuangan 5. Kepolisian Negara Republik Indonesia
24.	Pengawasan dan peningkatan kesadaran publik terhadap kejahatan dunia maya (<i>Cybercrime</i>)	Meningkatkan kesadaran publik terhadap kejahatan dunia maya (<i>Cybercrime</i>) melalui edukasi konsumen dan pelaku usaha tentang pentingnya keamanan transaksi elektronik	a. Peningkatan kesadaran konsumen agar mampu mendeteksi dan mencegah terjadinya kejahatan dunia maya (<i>Cybercrime</i>) b. Standar Operasional Prosedur bagi pedagang <i>online</i> dan/atau operator untuk menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian dan keamanan	November 2017	Menteri Komunikasi dan Informatika	1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 3. Kementerian Perdagangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
25.	Pengembangan Model Sistem Pengawasan Nasional dalam Transaksi <i>e-Commerce</i>	Mengembangkan Model Sistem Pengawasan Nasional dalam Transaksi <i>e-Commerce</i>	a. Transaksi <i>e-Commerce</i> yang telah menggunakan Model Sistem Pengawasan Nasional b. Sistem teknologi informasi dan pengawasan keamanan atas kegiatan transaksi elektronik yang terintegrasi	Januari 2018	Menteri Komunikasi dan Informatika	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2. Kementerian Keuangan 3. Kementerian Perdagangan 4. Bank Indonesia
H.	Pembentukan Manajemen Pelaksana Peta Jalan SPNBE 2017-2019					
26.	Pembentukan Manajemen Pelaksana Peta Jalan SPNBE 2017-2019	Membentuk Manajemen Pelaksana Peta Jalan SPNBE 2017-2019 yang secara administrasi berada di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	a. Anggaran untuk mendukung kegiatan Komite Pengarah, Tim Pelaksana, dan Manajemen Pelaksana pelaksanaan Peta Jalan SPNBE 2017-2019	2017 – 2019	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian	1. Kementerian Keuangan 2. Kementerian Komunikasi dan Informatika 3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

b. Standar...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
			b. Standar biaya dalam rangka pelaksanaan Peta Jalan SPNBE 2017-2019	Oktober 2017	Menteri Keuangan	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2. Kementerian Komunikasi dan Informatika
			c. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengenai pembentukan Manajemen Pelaksana Peta Jalan SPNBE 2017-2019	Oktober 2017	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian	Kementerian Komunikasi dan Informatika
			d. Tenaga ahli perseorangan dan/atau badan usaha Manajemen Pelaksana	Oktober 2017	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian	1. Kementerian Komunikasi dan Informatika 2. Kementerian Keuangan

3. Lembaga...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
						3. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Perekonomian,

